

Kualitas Manusia Indonesia Menyongsong Masyarakat Industri dan Perdagangan Bebas

Engkoswara

Abstrak: Bangsa Indonesia harus bersiap diri menyongsong masyarakat industri dan era perdagangan bebas. Kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan dengan pendekatan perspektif terpadu. Pendidikan merupakan salah satu alternatif strategik. Diperlukan setidaknya dua kebijakan nasional. Pertama, perlu ada keputusan politik sebagai upaya pengukuhan kebijakan mandataris tentang pendidikan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dalam PJP II. Kedua, diperlukan strategi operasional pengelolaan pendidikan yang dipusatkan kepada penyempurnaan pendekatan ke arah pendekatan perspektif terpadu dan kepada penetapan prioritas pendidikan.

Kata-kata kunci: kualitas manusia, masyarakat industri, perdagangan bebas, pendidikan.

Siap tidak siap, suka tidak suka, dunia cenderung ke arah perdagangan bebas. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa tiada pilihan bagi bangsa Indonesia selain mempersiapkan diri apabila bangsa Indonesia ingin sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia dan apabila tidak mau tetap tinggal di belakang atau di pinggiran menjadi penonton belaka.

Salah satu faktor dominan yang telah menjadi sasaran utama dalam PJP II ialah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas manusia yang bagaimanakah yang seyogyanya dipersiapkan supaya kita mampu hidup layak dalam menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas tahun 2003 di kawasan ASEAN dan tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik, sebagai tindak lanjut kesepakatan APEC Bogor, dipertanyakan dalam KIPNAS VI 1995.

Menyiapkan kualitas manusia yang diharapkan itu bukanlah hal yang baru dan pekerjaan mudah yang dapat dicapai dalam sekejap. Diperlukan suatu

Engkoswara adalah Guru Besar IKIP Bandung, ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

pendekatan perspektif terpadu, suatu pendekatan yang bertitik tolak pada keadaan saat ini, menelaah pengalaman masa silam dan berorientasi ke masa depan yang cukup jauh dalam berbagai dimensi kehidupan secara terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dirasa perlu ada studi kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas. Artikel ini akan membahas keterkaitan antara tiga hal, yakni karakteristik utama masyarakat industri dan perdagangan bebas, struktur kualitas manusia Indonesia, dan Pendidikan sebagai suatu alternatif strategik.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BEBAS

Memasuki PJP II, minimal terdapat 10 kecenderungan rona kehidupan di Indonesia yang memerlukan antisipasi secara cermat, meskipun diwarnai oleh perubahan-perubahan akibat globalisasi yang sangat cepat dan tiada menentu. Kesepuluh kecenderungan itu meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kependudukan, alam dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu dan teknologi, hankam, dan struktur nilai. Prioritas diletakkan pada bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, ekonomi yang memberikan tekanan pada industri yang ditopang oleh pertanian yang tangguh dan jasa informasi komunikasi dan perdagangan dan pelayanan yang semakin dominan (bandingkan dengan BP7 Pusat, 1993). Dengan perkataan lain, masyarakat Indonesia dewasa ini sedang menuju masyarakat industri dan perdagangan bebas atau pasar bebas menyongsong tahun 2003 di kawasan ASEAN dan tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik. Masyarakat baru ini tentu memiliki sistem nilai atau kebudayaan atau minimal karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pertanian yang selama ini kita alami di Indonesia. Sudah barang tentu banyak karakteristik yang dituntutnya. Namun terdapat minimal tiga karakteristik utama, yaitu persaingan yang efektif dan efisien, permitraan, dan kemandirian.

Persaingan yang efektif dan efisien ditandai dengan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang banyak dalam waktu yang relatif cepat, tenaga dan modal yang sesedikit mungkin, tetapi berkualitas, memenuhi keperluan atau relevan dengan kebutuhan pasar, memiliki bentuk yang menarik dan indah, disertai dengan harga yang lebih murah. Bermitra dalam arti mampu bekerjasama yang kenyal dan luwes, disertai dengan informasi dan komunikasi yang canggih, disiplin dalam perjanjian, tepat waktu, menyenangkan dan mendorong semangat

berkiprah berbagai pihak yang berkepentingan. Sedangkan kemandirian ialah mampu bertindak atas kekuatan sendiri, memiliki jati diri sebagai suatu bangsa yang dilandasi sistem nilai atau kebudayaan nasional, yang bagi bangsa Indonesia ialah hidup yang dilandasi oleh kebudayaan Pancasila yang berada di antara kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di kawasan Asia bahkan di dunia.

Itulah karakteristik utama yang menjadi tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas atau pasar bebas tahun 2003 di kawasan ASEAN dan tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik. Kecenderungan kehidupan dengan karakteristik demikian itu diyakini akan semakin baik dan dinamik, tetapi akan semakin rumit, penuh kendala dan tantangan, sehingga wajar apabila dituntut kualitas manusia yang memadai.

STRUKTUR KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Mengacu kepada kecenderungan dan karakteristik utama masyarakat industri dan perdagangan bebas tertera di atas, dirasa sangat perlu menggariskan kualitas manusia Indonesia yang bagaimanakah yang seyogyanya dipersiapkan agar mampu hidup layak dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Minimal strukturnya dapat menjadi rambu-rambu atau pola dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam mempersiapkannya.

Secara filosofis ideologis, Pancasila dan Ekaprasetya Pancakarsa menjadi nilai dasar, sumber hukum dan pedoman perilaku. Namun Pancasila sebagai ideologi terbuka secara operasional memerlukan penjabaran ke dalam nilai instrumental untuk mencapai nilai dasar dalam bentuk karya manusia yang menjadi perwujudan kemampuan dasar manusia berupa cipta, rasa dan karsa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Karya artinya adalah hasil buah pikiran, perasaan dan daya cipta budi daya manusia dalam wujud karya budaya dengan berbagai bentuk dan jenis. Karya manusia itu minimal dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu karya utama, karya profesi, dan karya penyerta.

Karya Utama dalam Bentuk Moral Pancasila

Karya utama merupakan karya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimiliki oleh semua orang khususnya orang Indonesia. Karya yang sangat mendasar yaitu Moral Pancasila yang merupakan etik yang menjadi dasar ketahanan nasional yang harus bersemayam pada setiap insan warga negara Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari warga kawasan

atau warga dunia. Moral Pancasila merupakan ciri khas, hakiki, jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya.

Nilai-nilai atau kemampuan (kompetensi) untuk mencapai karya utama adalah sebagai berikut:

Pertama, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dimulai dengan melaksanakan kebersihan sebagai bagian dari iman. Kebersihan adalah pangkal kesehatan dalam arti sehat mental dan fisik atau sehat jiwa dan raga. Atas dasar nilai inilah selanjutnya dilaksanakan kelima nilai-nilai luhur Pancasila lainnya secara utuh yang bertautan satu sama lain dan meresap dalam berbagai perilaku baik dan menghindari perbuatan yang tidak diharapkan. Apabila setiap orang beritikad baik yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diyakini tidak akan ada kejahatan.

Kedua, disiplin dalam melaksanakan undang-undang, peraturan dan konvensi yang berlaku baik di negara kita maupun kawasan dan dunia sehingga menghasilkan perilaku yang tertib, aman dan damai. Sehubungan dengan ini, Gerakan Disiplin Nasional sebaiknya dimulai dengan membiasakan diri yang berawal dari diri sendiri yang ditanamkan sedini mungkin dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketiga, memiliki wawasan, tilikan, pandangan atau cita-cita yang meliputi wawasan masa depan, wawasan pembangunan, wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, wawasan pengetahuan dasar, wawasan keluarga kecil bahagia sejahtera, wawasan lingkungan, dan wawasan lainnya disertai semangat juang dan patriotisme sebagai insan yang selalu meningkatkan diri menuju kehidupan yang lebih baik.

Nilai-nilai tersebut di atas terdapat pada 10 sifat pribadi dalam keputusan MPR-RI, yaitu sehat, iman dan taqwa, berbudipekerti luhur, patriotisme dan penuh disiplin (BP7 Pusat, 1993). Nilai-nilai tersebut terdapat juga dalam kebudayaan daerah yang menjadi akar kebudayaan nasional, misalnya dalam kebudayaan Jawa Barat, yaitu *cageur* (sehat), *bageur* (baik) dan *bener* (jujur).

Karya Profesi

Karya ini merupakan karya manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri dari kelompok-kelompok manusia yang memiliki kemampuan, minat dan keinginan yang relatif bersamaan, dilandasi oleh ilmu, teknologi dan seni, sebagai dasar pengembangan diri dan kemandirian secara ekonomik dalam arti untuk mencari nafkah atau upajawa, minimal untuk dirinya sendiri dan berangsur-

angsur untuk orang lain yang memerlukan. Salah satu indikator kemandirian suatu bangsa ialah kemandirian secara ekonomi.

Nilai-nilai untuk mencapai karya profesi itu meliputi: Pertama, sikap positif, mau membaca dan belajar sepanjang hayat, mau dan mampu bekerja dengan etos dan etika kerja disertai pandangan wirausaha dan berkoperasi. Kedua, penguasaan ilmu, teknologi dan seni yang tepat guna sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Kemampuan menguasai ilmu, teknologi dan seni itu lebih baik memiliki lebih dari satu nuansa keilmuan. Hal ini sangat penting karena perjalanan hidup dan kehidupan manusia cenderung berkembang, yang memungkinkan mereka menuju perkembangan karir secara luwes. Ilmu, teknologi dan seni memberikan peluang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara profesional untuk menghasilkan karya yang produktif secara efisien. Ketiga, memiliki keterampilan dasar yang kuat baik kemampuan nalar (*intellectual skills*) maupun keterampilan tangan (*manual skills*). Kedua keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan manusia khususnya menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas yang menuntut kreativitas dan inovasi (lihat Simanjuntak, 1992).

Ketiga nilai ini terdapat dalam 10 sifat pribadi keputusan MPR-RI yaitu cerdas, produktif dan profesional (BP7 Pusat, 1993). Nilai ini juga terdapat dalam budaya daerah (Jawa Barat) yang berisi *pinter* (cerdas), *singer* (terampil) dan *maher* (mahir atau cakap atau ahli).

Karya Penyerta

Karya ini berupa karya manusia sebagai makhluk pribadi yang memiliki keunikan masing-masing yang bersifat kreatif dan inovatif yang menghasilkan karya yang indah sebagai penyerta kedua karya tersebut di atas. Nilai ini berupa kreativitas yang ingin dan mampu menghasilkan sesuatu yang bermutu dan indah. Nilai ini terdapat dalam 10 sifat pribadi keputusan MPR-RI yaitu kreatif. Nilai ini pun terdapat dalam budaya daerah (Jawa Barat) yaitu *moher* (indah).

Keutuhan dan keharmonisan ketiga nilai atau kemampuan (kompetensi) itulah yang merupakan struktur kualitas manusia Indonesia yang seyogyanya dipersiapkan bangsa Indonesia agar mampu bersaing yang efisien, bermitra dan mandiri dalam rangka menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas atau pasar bebas 2003 di ASEAN dan tahun 2020 di Asia Pasifik.

Struktur kualitas manusia Indonesia tersebut di atas merupakan kualitas pribadi yang memerlukan penyesuaian dengan tingkat-tingkat perkembangan

manusia Indonesia. Struktur ini hendaknya diterapkan dalam struktur tenaga kerja yang dewasa ini masih sekitar 70% berpendidikan SD, 28% maksimal SM dan baru 2% pernah berpendidikan tinggi, dengan pendapatan rata-rata perkapita 920 dollar AS. Tenaga kerja semacam itu masih menunjukkan miring ke kiri, dan secara berangsur-angsur perlu ditingkatkan menuju kurve normal atau miring ke kanan.

PENDIDIKAN SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGIK

Kualitas manusia yang telah digariskan di atas agar dapat menjadi kekuatan nyata, memerlukan upaya pembekalan. Banyak upaya yang dilakukan sampai saat ini sebanyak aspek kehidupan yang ada dengan prioritas ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sudah tepat dengan pertimbangan bahwa suatu bangsa dikatakan mandiri dalam arti tidak tergantung dari negara lain apabila telah mandiri secara ekonomik. Manusia merupakan penggerak utama, baik sebagai tujuan maupun pelaku, yang telah menjadi sasaran utama PJP II. Salah satu kunci keberhasilan PJP II menyongsong era tinggal landas adalah pendidikan. Merealisasikan pernyataan itu, minimal perlu dua kebijakan nasional.

Pertama, perlu ada keputusan politik sebagai upaya pengukuhan kebijakan Mandataris tentang pendidikan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan SDM dalam PJP II. Prioritas pembangunan ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas SDM akan lebih sempurna apabila disertai dengan wahana utama melalui pendidikan dalam arti suatu upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan untuk menentukan peranannya di masa yang akan datang.

Keputusan politik ini sangat perlu diambil untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas, sehingga akan mengubah struktur tenaga kerja yang dewasa ini relatif masih sangat rendah, yaitu sekitar 70% masih berpendidikan maksimal SD yang memiliki kesejajaran dengan pendapatan rakyat yang masih sekitar 920 dollar AS, ke arah yang lebih baik.

Melalui keputusan politik semacam itu, diharapkan kepedulian berbagai pihak akan lebih terkonsentrasi terhadap pendidikan secara profesional dan proporsional. Secara proporsional diartikan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah (Undang-Undang Nomor II Tahun 1989; Soedijarto, 1993). Kesepakatan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga jelas proporsinya. Sedangkan secara profesional,

pendidikan perlu dikelola sesuai dengan keahlian para pengelola dan pelaksana pendidikan itu sendiri yang dipersiapkan sebagaimana mestinya.

Kedua, diperlukan strategi operasional pengelolaan pendidikan. Dewasa ini, ketentuan UUD 1945, GBHN dan UUSPN berikut Peraturan Pemerintah, sudah cukup lengkap. Tampaknya diperlukan strategi operasional dalam bentuk pengelolaan. Pendidikan harus dikelola secara konseptual tetapi yang dapat dilaksanakan. Pengelolaan artinya adalah keutuhan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, dana beserta fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu efektif dan efisien.

Pengelolaan perlu memberikan konsentrasi kepada: (1) Penyempurnaan pendekatan, yang dewasa ini masih bersifat fragmentaris yang menekankan pengetahuan sebagai kekuatan utama (*knowledge as a power*) menuju pendekatan perspektif terpadu secara berkesinambungan dengan memberikan tekanan utama pada pendidikan secara menyeluruh (*education as a power*). Pendekatan ini dapat dilakukan secara makro (nasional dan regional), meso (kelembagaan) dan secara mikro (proses pendidikan). Secara makro diawali dengan keterkaitan antara prioritas pembangunan ekonomi dengan kualitas manusia, khususnya tenaga kerja, dan pendidikan. Secara meso (kelembagaan) dapat dilihat padanan antara lembaga atau satuan pendidikan dengan dunia kehidupan atau dunia kerja yang ada atau yang diperlukan. Sedangkan secara mikro terdapat dalam proses pendidikan, atau lebih khusus proses belajar mengajar, pada setiap tingkatan dalam waktu yang relatif singkat; (2) Prioritas pendidikan. Pendidikan merupakan upaya besar, mendasar dan strategik. Prioritas pengelolaan diperlukan dalam rangka menyiapkan kualitas manusia yang diharapkan. Prioritas ada baiknya dikonsentrasikan pada lima nuansa utama, yaitu: pengelolaan pendidikan dasar dan berkelanjutan yang merata, relevan, bermutu dan efisien disertai dengan pusat-pusat keunggulan; tenaga kependidikan yang profesional dengan disertai fasilitas yang memadai; tanggungjawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah secara proporsional, sebagai penjabaran PP 39 tahun 1992; penelitian tentang pendidikan dan kebudayaan secara mendasar untuk kurun waktu yang cukup; pengelolaan pembiayaan pendidikan yang memadai yang efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Kualitas manusia Indonesia sebagai inti kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya yang telah menjadi sasaran utama PJP II perlu dipersiapkan dengan

seksama agar mampu bersaing secara efektif dan efisien, bermitra dan mandiri atas jatidiri bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong masyarakat industri dan perdagangan bebas atau pasar bebas tahun 2003 di kawasan ASEAN dan tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik.

Struktur kualitas manusia Indonesia yang perlu disiapkan, minimal memiliki tiga buah karya; karya utama berupa moral Pancasila, karya profesi yang dilandasi ilmu, teknologi dan seni, dan karya penyerta.

Wahana utama untuk menyiapkan manusia Indonesia yang berkualitas adalah pendidikan, baik pada tingkat makro, meso maupun mikro.

DAFTAR RUJUKAN

BP7 Pusat. 1993. *Bahan Penataran, Buku III: Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993*. Jakarta: BP7 Pusat.

Simanjuntak, Payaman J. 1992. Kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3-1992, hal. 24 - 36.

Soedijarto. 1993. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor II Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya. 1991. Jakarta: Sinar Grafika.